

**TINGKAT PEMAHAMAN NILAI-NILAI DEMOKRASI PADA
MAHASISWA PENDIDIKAN IPS
FIS UNY**

JURNAL

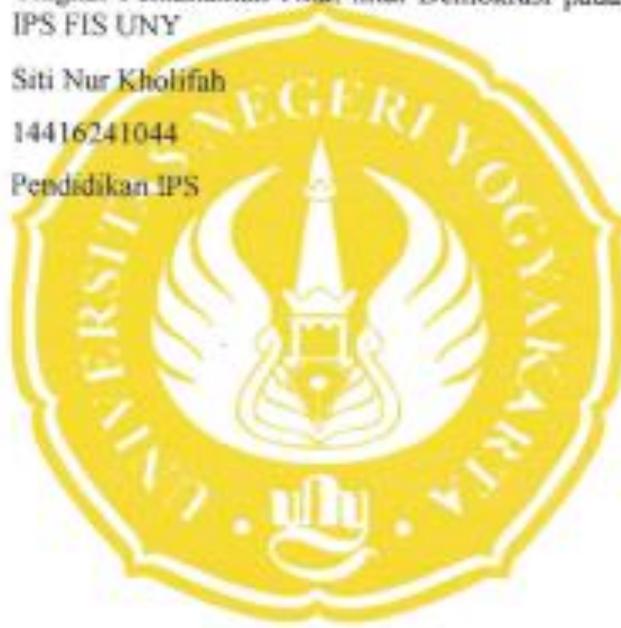


Oleh :
Siti Nur Kholifah
NIM 14416241044

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2018**

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Tingkat Pemahaman Nilai-nilai Demokrasi pada Mahasiswa Pendidikan IPS FIS UNY
Nama : Siti Nur Kholifah
NIM : 14416241044
Prodi : Pendidikan IPS



Yogyakarta, 23 Agustus 2018

Reviewer

Dr. Supardi, MLPd

NIP. 19730315200312 1 001

Pembimbing

Dr. Nasrwan, M.Si.

NIP. 19650417 200212 1 001

Rekomendasi Pembimbing: (mohon lingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civics
3. Dikirim ke Journal lain

TINGKAT PEMAHAMAN NILAI-NILAI DEMOKRASI PADA MAHASISWA PENDIDIKAN IPS FIS UNY

LEVELS OF THE UNDERSTANDING OF DEMOCRATIC VALUES AMONG STUDENTS OF SOCIAL STUDIES EDUCATION, FSS, YSU

Oleh: Siti Nur Kholifah dan Dr. Nasiwan, M.Si.

Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

Email: siti.nur@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi pada mahasiswa Pendidikan IPS FIS UNY. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dilaksanakan di Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi pada mahasiswa Pendidikan IPS. Populasi dalam penelitian adalah seluruh mahasiswa Pendidikan IPS angkatan 2015 yang berjumlah 79 mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi pada mahasiswa Pendidikan IPS FIS UNY adalah 54,4% termasuk ke dalam kategori sangat baik, 45,6% dalam kategori baik, dan 0% untuk kategori cukup dan kurang. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi pada mahasiswa Pendidikan IPS FIS UNY tidak ada yang termasuk ke dalam kategori cukup dan kurang.

Kata Kunci: tingkat pemahaman, nilai-nilai demokrasi

Abstract

This study aims to find out the levels of the understanding of democratic values among students of Social Studies Education, Faculty of Social Sciences (FSS), Yogyakarta State University (YSU). This was a descriptive study using the quantitative approach. It was conducted in the Study Program of Social Studies Education, FSS, YSU. The research variable was the levels of the understanding of democratic values among students of Social Studies Education. The research population comprised all 2015 admission year students of Social Studies Education with a total of 79 students. The results show that regarding the levels of the understanding of democratic values among students of Social Studies Education, FSS, YSU, 54.4% are in the very good category, 45.6% in the good category, and 0% in the moderate and poor categories. Based on the analysis results, there is no level of the understanding of democratic values among students of Social Sciences Education, FSS, YSU, in the moderate and poor categories.

Keywords: *levels of understanding, democratic values*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial, selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Manusia dalam aktivitas kehidupannya akan banyak menemui perbedaan-perbedaan di masyarakat. Oleh karena itu setiap individu perlu memahami perbedaan-perbedaan yang ada. Latar belakang sosial masyarakat yang berbeda-beda tersebut dapat dijumpai salah satunya di negara Indonesia.

Menurut hasil sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, Indonesia memiliki 633 kelompok suku besar yang dapat dikategorikan menjadi 1331 suku (www.bps.go.id). Perbedaan tersebut mengharuskan masyarakat untuk memahami bahwa setiap individu memiliki kesetaraan yang sama sehingga tidak boleh membedakan latar belakang yang dimiliki. Pandangan tersebut merupakan ciri-ciri dari kehidupan yang demokratis.

Kehidupan yang demokratis berkaitan erat dengan warga negara yang demokratis. Warga negara yang demokratis merupakan salah satu tujuan dari pendidikan nasional yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah agar manusia berkembang menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Salah satu mata pelajaran di dunia pendidikan yang mengandung nilai-nilai demokrasi adalah pelajaran IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial). Menurut Supardi (2015: 189) nilai-nilai yang dapat dikembangkan dari IPS antara lain: keimanan dan ketakwaan, keadilan dan kesetaraan, nasionalisme, patriotisme dan jati diri bangsa, demokrasi dan tanggung jawab. Demokrasi merupakan salah satu nilai yang dapat dikembangkan melalui IPS sehingga melalui IPS masyarakat dapat memahami nilai-nilai demokrasi.

Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara yang memiliki keanekaragaman, memerlukan masyarakat yang paham akan nilai-nilai demokrasi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diperlukan karena setiap masyarakat memiliki latar belakang yang tidak sama sehingga apabila nilai-nilai demokrasi diterapkan dalam kehidupan masyarakat, maka keadaan menjadi harmonis dan terhindar dari permusuhan. Akan tetapi pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang dilakukan masyarakat Indonesia tidak lepas dari adanya luput, contohnya adalah masalah intoleransi. Intoleransi menjadi masalah pelanggaran yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi perbedaan di Indonesia. Persoalan intoleransi ini sering kali menjadi ancaman bagi persatuan bangsa.

Berdasarkan berita yang dikutip dari (nasional.kompas.com), Wahid Foundation bekerjasama dengan LSI melakukan survei untuk mengukur adanya intoleransi pada masyarakat. Survei tersebut dilakukan kepada pemeluk agama Islam, sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia. Hasil survei menunjukkan adanya sejumlah data yaitu dari total 1.520 responden, terdapat 59,9 persen responden memiliki kelompok yang dibenci. Kelompok yang dibenci tersebut adalah kelompok yang berlatarbelakang agama nonmuslim, kelompok tionghoa, dan sebagainya. Kemudian dari 59,9 persen responden yang memiliki kelompok yang dibenci, 92,2 persen tidak setuju apabila ada anggota kelompok yang dibenci menjadi pejabat pemerintah di Indonesia dan 82,4 persen tidak

rela anggota kelompok yang dibenci tersebut menjadi tetangga tempat tinggal (Hakim, 2016).

Hak dan kewajiban masyarakat di negara demokrasi mendapatkan jaminan dan perlindungan dari pemerintah di antaranya adalah hak kebebasan sipil, akan tetapi pada kenyataannya kebebasan masyarakat sering mengalami hambatan. Berdasarkan laporan Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2016 dari Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dikutip dari (kompas.com) aspek kebebasan sipil menurun akibat dari meningkatnya hambatan kebebasan berkumpul, berserikat, dan diskriminasi.

Berkaitan dengan beberapa persoalan yang dihadapi demokrasi di Indonesia, sebagai mahasiswa Pendidikan IPS dan calon guru IPS yang telah menempuh mata kuliah yang berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi maka mahasiswa harus memiliki pemahaman mengenai nilai-nilai tersebut. Mahasiswa Pendidikan IPS angkatan 2015 yang pada saat ini memasuki semester 7 telah menempuh mata kuliah yang berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Tingkat Pemahaman Nilai-nilai Demokrasi pada Mahasiswa Pendidikan IPS FIS UNY".

KAJIAN PUSTAKA

1. Pemahaman

Menurut Uno & Koni Satria (2014: 61) pemahaman diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Kemampuan pemahaman memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari kemampuan mengetahui.

2. Demokrasi

a. Pengertian Demokrasi

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang ditentukan oleh rakyat. Terdapat beberapa ahli yang memberikan penjelasan mengenai pengertian demokrasi. Menurut Ubaedilah dkk (2011: 36) secara etimologis kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *demos* yang diartikan sebagai rakyat atau penduduk suatu tempat, dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Kemudian gabungan dua kata *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

b. Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Menurut Sunarso dkk (2013: 90) perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut. Perkembangan demokrasi dibagi menjadi periode-periode berikut ini:

1) Demokrasi di Indonesia antara tahun 1945-1950

Pada masa ini di Indonesia berlaku sistem pemerintahan parlementer yang tidak dikehendaki UUD 1945. Hal ini berlaku dengan adanya pengumuman pemerintah yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik yang mendapatkan sambutan antusias dari rakyat. Sistem parlementer yang berlaku menyatakan bahwa tanggung jawab politik terletak di tangan menteri. Hal ini dipertahankan sampai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2) Demokrasi Liberal antara tahun 1950-1959

Sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia mulai berlaku UUD Sementara 1950. Negara menganut sistem pemerintahan parlementer, para menteri bertanggung jawab kepada badan legislatif (parlemen). Pada masa ini terdapat kebebasan yang diberikan kepada masyarakat tanpa pembatasan dan persyaratan yang tegas dan nyata untuk melakukan kegiatan politik yang berakibat pada terus bertambahnya partai-partai politik yang bermunculan. Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa Konstituante dibubarkan dan kembali ke UUD 1945 yang menghendaki terbentuknya MPRS dan DPRS.

3) Demokrasi Terpimpin (Orde Lama)

Demokrasi terpimpin merupakan istilah yang dikemukakan Presiden Soekarno pada saat membuka Konstituante pada tanggal 10 November 1956. Struktur demokrasi terpimpin bertujuan untuk menstabilkan kondisi negara. Akan tetapi maksud Presiden tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari konstituante. Sementara itu konstituante tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pada masa ini kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berpikir dibatasi dalam tingkat-tingkat tertentu. Presiden dipandang memiliki kekuasaan mutlak yang dijadikannya sebagai alat untuk menghindari kekuatan yang akan menghalangi dan mempunyai peranan dan kekuasaan terhadap kehidupan suatu partai. Hal ini menunjukkan bahwa nasib partai politik ditentukan oleh presiden.

4) Demokrasi Pancasila

Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi atas

berbagai penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin Orde Lama. Pada awalnya Orde Baru berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai bidang. Akan tetapi ambisi penguasa Orde Baru merambah ke seluruh sendi kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Kekuasaan Orde Baru menjadi otoriter namun seolah-olah dilaksanakan secara demokratis. Pelaksanaan demokrasi Pancasila ini belum sesuai dengan jiwa, semangat, dan ciri-ciri yang seharusnya. Hal ini terjadi karena presiden dominan dalam suprastruktur dan infrastruktur politik yang mengakibatkan terjadinya banyak manipulasi politik dan membudayanya KKN sehingga negara Indonesia terjerumus dalam krisis yang berkepanjangan.

5) Demokrasi (Era Reformasi)

Awal keberhasilan gerakan reformasi ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan dan digantikan oleh wakil presiden Prof. Dr. BJ. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Pemerintahan Habibie ini yang merupakan pemerintahan transisi yang membawa Indonesia melakukan reformasi secara menyeluruh dan menata sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dengan mengadakan perubahan UUD 1945. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila pada era reformasi banyak memberikan ruang gerak kepada partai politik maupun lembaga negara (DPR) untuk mengawasi pemerintahan secara kritis, pemberian peluang untuk berunjuk rasa dan beroposisi, serta optimalisasi hak-hak DPR.

c. Nilai-nilai Demokrasi

Winarno (2007: 3) menjelaskan bahwa nilai adalah sesuatu yang berharga, baik dan berguna bagi kehidupan manusia. Nilai dapat dijadikan sebagai suatu penghargaan atau kualitas terhadap suatu hal, yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku manusia karena sesuatu itu memiliki kegunaan, meyakinkan, memuaskan, menarik, menguntungkan, dan menyenangkan.

Menurut Zamroni (2007: 160) bentuk masyarakat demokratis akan tumbuh dan kokoh apabila di kalangan masyarakat tumbuh berkembang kultur dan nilai-nilai demokrasi antara lain: 1) toleransi; 2) bebas mengemukakan dan menghormati perbedaan pendapat; 3) memahami keanekaragaman dalam bermasyarakat; 4) terbuka dalam berkomunikasi; 5) menjunjung nilai-nilai dan martabat kemanusiaan; 6) percaya diri tidak menggantungkan diri pada orang lain; 7) saling menghargai; 8) mampu mengekang diri; 9) kebersamaan; dan 10) keseimbangan.

Nilai-nilai demokrasi diperlukan sebagai acuan bagi masyarakat untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Menurut Mayo (dalam Cholisin dan Nasiwan (2012: 89-90) nilai-nilai demokrasi di antaranya sebagai berikut: 1) menyelesaikan pertikaian secara damai; 2) menjamin perubahan secara damai; 3) mengadakan pergantian pimpinan secara teratur; 4) mengakui adanya nilai keberagaman; 5) menegakkan keadilan (persamaan); dan 6) memajukan ilmu pengetahuan (mengembangkan potensi pikiran, kreativitas, dan inovasi).

3. Ilmu Pengetahuan Sosial

Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS menurut Supardan (2015: 17) adalah program pembelajaran yang bertujuan untuk membantu dan melatih anak didik, agar memiliki kemampuan untuk mengenal dan menganalisis suatu persoalan dari berbagai sudut pandang secara komprehensif.

4. Keterkaitan IPS dengan Pemahaman Nilai-nilai Demokrasi

IPS memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai demokrasi yaitu nilai-nilai demokrasi merupakan salah satu nilai yang dapat dikembangkan dari IPS, IPS memiliki tujuan salah satunya adalah untuk memberikan pengetahuan kepada siswa agar berkembang menjadi warga negara yang demokratis. Warga negara yang demokratis dapat dilihat dari nilai-nilai demokrasi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya, Hal ini menunjukkan bahwa IPS berperan penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Maksud dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki suatu keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan yang kemudian hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena penyajian data dalam bentuk angka-angka.

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi pada mahasiswa Pendidikan IPS FIS UNY, setelah mahasiswa menempuh mata kuliah yang berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi.

Uji Coba Instrumen

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sebelum digunakan untuk mendapatkan data

penelitian dilakukan uji coba terlebih dahulu. Uji coba dilakukan pada 30 mahasiswa Pendidikan IPS angkatan 2014. Uji coba instrumen yang dilakukan meliputi uji aspek validitas dan reliabilitas.

Jumlah pernyataan yang diujicobakan adalah 60 butir. Setelah dianalisis instrumen tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi pada mahasiswa ditemukan 8 butir pernyataan yang tidak valid atau gugur. Berdasarkan uji reliabilitas instrumen menggunakan rumus *Alpha Cronbarch*, hasil yang diperoleh adalah instrumen diperoleh adalah instrumen memiliki reliabilitas yang sangat kuat dengan nilai reliabilitas sebesar 0,966.

Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis menggunakan statistika deskriptif yang meliputi perhitungan mean, median, modus, dan standar deviasi. Data yang sudah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan histogram. Skor yang dihasilkan dalam penelitian ini kemudian dikategorikan ke dalam skala empat yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data penelitian dari 79 responden, diperoleh data tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi pada mahasiswa Pendidikan IPS. Data yang diperoleh antara lain nilai *maksimum* sebesar 192 dan nilai *minimum* sebesar 133. Nilai *Mean* yang diperoleh sebesar 157,19, nilai modus 168 dan median 157. Jangkauan atau *Range* diperoleh dari nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, yaitu $192 - 133 = 59$.

Jumlah kelas dihitung menggunakan rumus $k = 1 + 3,33 \log n$ dengan jumlah $n = 79$, maka $1 + 3,3 \log 79 = 1 + 3,3 (1,89) = 7,2$ dibulatkan menjadi 7 kelas. Panjang kelas interval diperoleh dari jangkauan dibagi jumlah kelas (k) maka $59 : 7 = 8,43$ dibulatkan menjadi 8. Pembagian kelas tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Skor Tingkat Pemahaman Nilai-nilai Demokrasi pada Mahasiswa Pendidikan IPS

Interval	Frekuensi	Persentase
185-192	2	2,53 %
177-184	0	0 %
169-176	9	11,39 %
161-168	20	25,31 %
153-160	22	27,84 %
145-152	15	18,98 %
137-144	9	11,39 %
129-136	2	2,53 %
Total	79	100 %

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan acuan norma pengkategorian yang dijelaskan pada teknik analisis data, diperoleh nilai *Mean* 120 dan nilai Standar Deviasi 24. Tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi pada mahasiswa dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah seperti berikut ini:

Sangat : $X \geq Mi + 1,5 SDi = X \geq 156$

Baik

Baik : $Mi \leq X < Mi + 1,5 SDi = 120 \leq X < 156$

Cukup : $Mi - 1,5 SDi \leq X < Mi = 84 \leq X < 120$

Kurang : $Mi - 1,5 SDi > X = 84 > X$

Berdasarkan pengkategorian tersebut maka dapat diperoleh distribusi kecenderungan frekuensi sebagai berikut:

Tabel 7. Skor Tingkat Pemahaman Nilai-nilai Demokrasi pada Mahasiswa Pendidikan IPS

Interval	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
$X \geq 156$	43	54,4	Sangat Baik
$120 \leq X < 156$	36	45,6	Baik
$84 \leq X < 120$	0	0	Cukup
$84 > X$	0	0	Kurang
Total	79	100,0%	

Berdasarkan tabel maka diperoleh data sebanyak 43 mahasiswa (54,4%) mempunyai tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi dengan kategori sangat baik, sebanyak 36 mahasiswa (45,6%) mempunyai tingkat pemahaman dengan kategori baik. Berdasarkan hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi yang dimiliki mahasiswa Pendidikan IPS FIS UNY angkatan 2015 tidak

ada yang termasuk ke dalam kategori cukup dan kurang.

Berikut ini merupakan tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi pada setiap indikator:

1. Tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi pada nilai kebebasan

Tabel 8. Tingkat Pemahaman Nilai-nilai Demokrasi pada Mahasiswa Pendidikan IPS mengenai Nilai Kebebasan

Kategori	Frekuensi	Persentase
Sangat Baik	29	36,7%
Baik	49	62%
Cukup	1	1,3%
Kurang	0	0
Total	79	100,0%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

2. Tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi pada nilai kebersamaan

Tabel 9. Tingkat Pemahaman Nilai-nilai Demokrasi pada Mahasiswa Pendidikan IPS mengenai Nilai Kebersamaan

Kategori	Frekuensi	Persentase
Sangat Baik	35	44,3%
Baik	43	54,4%
Cukup	1	1,3%
Kurang	0	0
Total	79	100,0%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

3. Tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi pada nilai menghormati adanya keanekaragaman

Tabel 10. Tingkat Pemahaman Nilai-nilai Demokrasi pada Mahasiswa Pendidikan IPS mengenai Nilai Menghormati Adanya Keanekaragaman

Kategori	Frekuensi	Persentase (%)
Sangat Baik	59	74,7%
Baik	20	25,3%
Cukup	0	0%
Kurang	0	0%
Total	79	100,0%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

4. Tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi pada nilai ikut berpartisipasi dalam pergantian pemimpin

Tabel 11. Tingkat Pemahaman Nilai-nilai Demokrasi pada Mahasiswa Pendidikan IPS mengenai Nilai Ikut Berpartisipasi dalam Pergantian Pemimpin

Kategori	Frekuensi	Persentase
Sangat Baik	23	29,1%
Baik	51	64,6%
Cukup	5	6,3%
Kurang	0	0
Total	79	100,0%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

5. Tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi pada nilai memajukan ilmu pengetahuan

Tabel 12. Tingkat Pemahaman Nilai-nilai Demokrasi pada Mahasiswa Pendidikan IPS mengenai Nilai Memajukan Ilmu Pengetahuan

Kategori	Frekuensi	Persentase
Sangat Baik	48	60,8%
Baik	31	39,2%
Cukup	0	0
Kurang	0	0
Total	79	100,0%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Pembahasan

Berdasarkan data yang telah dihitung, diketahui bahwa tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi pada mahasiswa Pendidikan IPS yang termasuk pada kategori sangat baik adalah 54,40%, kategori baik sebanyak 45,6%, serta 0% untuk kategori cukup dan kurang. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi pada mahasiswa Pendidikan IPS FIS UNY tidak ada yang termasuk ke dalam kategori cukup dan kurang. Hasil penelitian juga menunjukkan tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi yang memiliki skor tertinggi adalah nilai menghormati adanya keanekaragaman yaitu sebanyak 74,7% (pada kategori sangat baik) sedangkan yang memiliki skor terendah adalah nilai ikut berpartisipasi dalam pergantian pemimpin yaitu 6,3% (pada kategori cukup). Hal ini menunjukkan bahwa 6,8% dari jumlah responden yaitu mahasiswa Pendidikan IPS pemahamannya mengenai nilai ikut berpartisipasi dalam pergantian pemimpin masih kurang. Pemahaman yang kurang tersebut diakibatkan karena mahasiswa belum terlalu aktif dan belum memiliki pengalaman yang lebih jauh dalam

pelaksanaan kegiatan partisipasi seperti pemilihan umum, karena pada dasarnya pemahaman yang dimiliki seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki. Pemahaman yang kurang ini akan menyebabkan kurangnya partisipasi mahasiswa dalam menentukan pemimpin yang akan berkuasa.

Menurut Zamroni (2013: 15) partisipasi merupakan keikutsertaan aktif warga masyarakat dalam proses politik. Partisipasi terdiri dari nonpartisan dan partisan. Kegiatan nonpartisan adalah kegiatan yang tidak memiliki kaitan dengan kegiatan partai politik di mana tujuan semata-mata untuk kebaikan masyarakat tanpa ada tujuan untuk memegang kekuasaan politik. Berdasarkan hasil penelitian maka sebagai calon guru IPS, mahasiswa harus mempelajari lebih dalam mengenai nilai ikut berpartisipasi dalam pergantian pemimpin. Hal ini dilakukan agar dalam pembelajaran IPS, guru IPS dapat memberikan pengetahuan kepada siswa bahwa hak setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pergantian pemimpin harus digunakan dengan sebaik-baiknya karena setiap satu suara sangat berarti bagi terpilihnya seorang pemimpin. Kemudian di samping itu guru juga perlu memberikan pemahaman mengenai kegiatan non partisan yaitu keikutsertaan aktif warga negara yang tidak berkaitan dengan politik di mana hal ini dapat dilakukan dengan aktif mengikuti kegiatan di kampung halaman, kegiatan karang taruna dan kegiatan nonpartisan lainnya. Apabila hal tersebut dapat dilakukan dengan baik maka peran serta IPS dalam mewujudkan warga negara yang demokratis dapat terwujud.

Menurut Supardi (2015: 300) salah satu tujuan dari IPS adalah memberikan pengetahuan agar siswa dapat menghayati nilai-nilai hidup yang baik dan tumbuh menjadi warga negara yang demokratis. Kehidupan yang demokratis akan terwujud apabila dalam kehidupan sehari-harinya warga negara menganut nilai-nilai demokrasi. Hal tersebut menunjukkan nilai-nilai demokrasi sebagai salah satu nilai kehidupan yang dikembangkan dari IPS memiliki andil dalam mewujudkan warga negara yang demokratis.

Pemahaman yang dimiliki mahasiswa mengenai nilai-nilai demokrasi ini diharapkan dapat diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Uno & Koni Satria (2014: 61) berpendapat bahwa pemahaman diartikan dengan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri

tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Apabila mahasiswa sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai nilai-nilai demokrasi maka mahasiswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai demokrasi yang dapat berkembang di antaranya adalah nilai kebebasan, kebersamaan, menghormati adanya keanekaragaman, ikut berpartisipasi dalam pergantian pemimpin, dan memajukan ilmu pengetahuan.

Berikut ini merupakan tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi pada setiap indikator:

- a) Tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi pada mahasiswa Pendidikan IPS FIS UNY mengenai nilai kebebasan

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 8, menunjukkan bahwa tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi pada mahasiswa Pendidikan IPS mengenai nilai kebebasan termasuk dalam kategori baik yaitu 62%. Kemudian hasil analisis data pada tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi tiap sub indikator dari nilai kebebasan menunjukkan sub indikator memahami aspek kebebasan sipil memiliki skor tertinggi yaitu 69,6% sedangkan skor terendah pada sub indikator memahami contoh nilai kebebasan yaitu 53,2%. Apabila skor memahami contoh nilai kebebasan termasuk dalam kategori yang rendah maka mahasiswa belum begitu memahami contoh-contoh kebebasan yang diterimanya sebagai warga masyarakat. Pada dasarnya kebebasan sudah dijamin dalam UUD 1945 pasal 28 E ayat 2 dan 3 serta pasal 28 I ayat 2. Sebagai calon guru IPS, mahasiswa harus memahami bahwa dalam pembelajaran, guru harus memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat agar siswa dapat berkembang dan mampu menggali potensi yang dimiliki.

Menurut Winarno (2007: 93) kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Skor mengenai nilai kebebasan termasuk ke dalam kategori baik disebabkan karena mahasiswa sudah memahami nilai-nilai kebebasan tersebut. Hal ini diketahui berdasarkan hasil jawaban responden yang menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa dapat memahami pernyataan dari setiap sub indikator. Akibat dari pemahaman yang dimiliki mahasiswa dari tingkat pemahaman mengenai nilai kebebasan yang termasuk dalam kategori baik adalah mahasiswa dapat menggunakan hak yang dimiliki untuk menentukan kehidupannya tanpa

merasa khawatir karena memiliki jaminan hukum dan mendapat perlindungan dari pemerintah.

- b) Tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi pada mahasiswa pendidikan IPS FIS UNY mengenai nilai kebersamaan

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 9, menunjukkan bahwa tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi pada mahasiswa Pendidikan IPS mengenai nilai kebersamaan termasuk dalam kategori baik yaitu 54,4%. Kemudian hasil analisis data pada tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi tiap sub indikator dari nilai kebersamaan menunjukkan bahwa sub indikator memahami kehidupan bersama di masyarakat memiliki skor tertinggi yaitu 65,8% sedangkan skor terendah pada sub indikator memahami keterampilan yang harus dimiliki masyarakat yaitu 32,9%. Mahasiswa Pendidikan IPS harus meningkatkan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat karena apabila keterampilan yang dimiliki rendah maka pemikiran yang dimiliki tidak akan tersampaikan dengan baik. Sebagai calon guru IPS mahasiswa harus memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat baik untuk diterapkan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar.

Menurut Zamroni (2013: 31-32) keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat meliputi: keterampilan menyampaikan ide, keterampilan mendengarkan ide orang lain dan memberikan tanggapan dengan sopan, keterampilan untuk mengidentifikasi masalah dan mencari bukti-bukti pendukung, keterampilan mengambil keputusan dan keterampilan dalam mengeksekusi keputusan bersama. Skor mengenai nilai kebersamaan termasuk ke dalam kategori sangat baik disebabkan karena mahasiswa sudah memahami nilai-nilai kebersamaan tersebut. Hal ini diketahui berdasarkan hasil jawaban responden yang menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa dapat memahami pernyataan dari setiap sub indikator. Akibat dari pemahaman yang dimiliki mahasiswa dari tingkat pemahaman mengenai nilai kebersamaan yang termasuk dalam kategori sangat baik adalah mahasiswa dapat berperan serta dalam memecahkan masalah yang terjadi di dalam masyarakat melalui keterampilan yang dimilikinya.

- c) Tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi pada mahasiswa Pendidikan IPS FIS UNY mengenai menghormati adanya keanekaragaman

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 10, menunjukkan bahwa tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi pada mahasiswa Pendidikan IPS mengenai nilai menghormati adanya keanekaragaman termasuk dalam kategori sangat baik yaitu 74,7%. Kemudian hasil analisis data pada tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi tiap sub indikator dari nilai menghormati adanya keanekaragaman menunjukkan bahwa sub indikator memahami keanekaragaman dengan tidak membedakan memiliki skor tertinggi yaitu 78,5% sedangkan skor terendah pada sub indikator memahami manfaat keanekaragaman yaitu 65,8%. Rendahnya skor mengenai memahami manfaat keanekaragaman dapat berdampak pada timbulnya masalah di kalangan masyarakat bahkan dapat menimbulkan adanya konflik. Oleh karena itu mahasiswa Pendidikan IPS harus meningkatkan pemahamannya mengenai manfaat keanekaragaman agar pada saat pembelajaran dapat memberikan pengetahuan kepada siswa bahwa keanekaragaman dalam masyarakat harus dijaga dengan baik karena merupakan suatu identitas bangsa.

Menurut Zamroni (2007: 77) pluralisme dapat didefinisikan dalam berbagai cara. Definisi yang paling memadai, pluralisme adalah suatu masyarakat yang warga masyarakatnya beragam, baik berdasar suku, ras, agama dan status sosial, dan masing-masing mengembangkan tradisi mereka. Sementara itu mereka tetap dapat bekerjasama dan saling tergantung satu dengan yang lain dalam mewujudkan kehidupan kesatuan bermasyarakat dan bernegara. Fokus utama dalam masyarakat pluralisme adalah adanya saling kerjasama, ketergantungan, dan persatuan bangsa. Skor mengenai nilai menghormati adanya keanekaragaman termasuk ke dalam kategori sangat baik disebabkan karena mahasiswa sudah memahami nilai-nilai menghormati adanya keanekaragaman tersebut. Hal ini diketahui berdasarkan hasil jawaban responden yang menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa dapat memahami pernyataan dari setiap sub indikator. Akibat dari pemahaman yang dimiliki mahasiswa dari tingkat pemahaman mengenai nilai menghormati adanya keanekaragaman yang termasuk dalam kategori sangat baik adalah mahasiswa dapat menyikapi perbedaan atau keanekaragaman yang ada di masyarakat.

d) Tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi pada mahasiswa pendidikan IPS FIS UNY mengenai nilai ikut berpartisipasi dalam pergantian pemimpin

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 11, menunjukkan bahwa tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi pada mahasiswa Pendidikan IPS mengenai nilai ikut berpartisipasi dalam pergantian pemimpin termasuk dalam kategori baik yaitu 64,6%. Kemudian hasil analisis data pada tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi tiap sub indikator dari nilai ikut berpartisipasi dalam pergantian pemimpin menunjukkan bahwa sub indikator memahami cara pengambilan keputusan dan memahami bentuk-bentuk partisipasi memiliki skor tertinggi yaitu 60,8% sedangkan skor terendah pada sub indikator memahami pemilihan umum yaitu 49,4%. Jika pemahaman mengenai pemilihan umum termasuk ke dalam kategori rendah maka mahasiswa harus lebih giat dalam mengikuti informasi pemilihan umum karena pemahaman mengenai pemilihan umum sangat penting. Sebagai calon guru IPS, mahasiswa harus memberikan pengetahuan kepada siswa bahwa pemilihan umum adalah pesta demokrasi yang digunakan sebagai sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin sesuai dengan kehendaknya sehingga hak suara yang dimiliki harus digunakan dengan baik dan menghindari golput.

Sunarso dkk (2013: 103) menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan sarana demokrasi yang berguna dalam mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Adanya pemilihan umum memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih anggota-anggota yang menjabat di lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat. Pemilihan umum merupakan salah satu sarana bagi masyarakat mengenai ikut berpartisipasi dalam pergantian pemimpin. Skor mengenai nilai ikut berpartisipasi dalam pergantian pemimpin termasuk ke dalam kategori baik disebabkan karena mahasiswa sudah memahami nilai-nilai ikut berpartisipasi dalam pergantian pemimpin. Hal ini diketahui berdasarkan hasil jawaban responden yang menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa dapat memahami pernyataan dari setiap sub indikator. Akibat dari pemahaman yang dimiliki mahasiswa dari tingkat pemahaman mengenai nilai ikut berpartisipasi dalam pergantian pemimpin yang termasuk dalam kategori baik adalah mahasiswa dapat menggunakan hak pilih yang dimiliki untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendaknya dan ikut serta dalam berbagai proses politik.

e) Tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi pada mahasiswa Pendidikan IPS FIS UNY mengenai nilai memajukan ilmu pengetahuan Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 12, menunjukkan bahwa tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi pada mahasiswa Pendidikan IPS mengenai nilai memajukan ilmu pengetahuan termasuk dalam kategori sangat baik yaitu 60,8%. Kemudian hasil analisis data pada tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi tiap sub indikator dari nilai memajukan ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa sub indikator memahami cara pemerolehan ilmu pengetahuan memiliki skor tertinggi yaitu 63,3% sedangkan skor terendah pada sub indikator memahami manfaat ilmu pengetahuan yaitu 51,9%. Adanya pemahaman yang rendah mengenai manfaat ilmu pengetahuan menunjukkan mahasiswa belum memahami bahwa ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk menggali berbagai macam informasi. Oleh karena itu mahasiswa harus mulai rajin membaca dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Pembelajaran IPS selalu terkait dengan perkembangan zaman dan teknologi sehingga mengharuskan guru untuk dapat memberikan informasi-informasi terbaru kepada para siswa. Hal ini diharapkan agar siswa dapat memiliki wawasan yang luas serta dapat terbuka dalam berfikir dan menerima perubahan-perubahan baru.

Menurut Cholisin (2013: 21) pembahasan mengenai ilmu pengetahuan akan berkaitan erat dengan perkembangan teknologi. Adanya pengakuan dan jaminan bagi persamaan dan kebebasan setiap orang untuk mengembangkan potensi pikiran, kreativitas, dan inovasi akan memberikan motivasi dan kesempatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Skor mengenai nilai memajukan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam kategori sangat baik disebabkan karena mahasiswa sudah memahami nilai-nilai memajukan ilmu pengetahuan. Hal ini diketahui berdasarkan hasil

jawaban responden yang menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa dapat memahami pernyataan dari setiap sub indikator. Akibat dari pemahaman yang dimiliki mahasiswa dari tingkat pemahaman mengenai nilai memajukan ilmu pengetahuan yang termasuk dalam kategori sangat baik adalah mahasiswa dapat menyalurkan potensi dan kreativitas yang dimiliki untuk berinovasi dan mendapatkan sesuatu yang baru.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi pada mahasiswa Pendidikan IPS FIS UNY adalah 54,4% termasuk ke dalam kategori sangat baik, 45,6% termasuk ke dalam kategori yang baik, 0% untuk kategori cukup dan kurang. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka tingkat pemahaman nilai-nilai demokrasi pada mahasiswa Pendidikan IPS FIS UNY tidak ada yang termasuk ke dalam kategori cukup dan kurang.

Saran

1. Bagi jurusan Pendidikan IPS, mengupayakan peningkatan pemahaman nilai-nilai demokrasi pada mahasiswa mengingat pentingnya pemahaman nilai-nilai demokrasi yang perlu dimiliki mahasiswa sebagai calon guru IPS.
2. Bagi mahasiswa, mahasiswa lebih meningkatkan lagi pemahamannya mengenai nilai-nilai demokrasi sebagai persiapan untuk menjadi guru IPS. Oleh karena itu mahasiswa diharapkan lebih aktif dalam membaca buku atau berita untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai nilai-nilai demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2015). *Mengulik Data Suku di Indonesia*. Diakses pada tanggal 8 April 2018 dari <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>
- Cholisin. (2013). *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Yogyakarta: Ombak.

- Cholisin dan Nasiwan. (2012). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Ombak.
- Depdikbud. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Hakim, R.N. (1 Agustus 2016). Survei Wahid Foundation: Indonesia Masih Rawan Intoleransi dan Radikalisme. *Kompas*, hlm. 1. Diakses pada tanggal 8 April 2018 dari <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/01/13363111/survei.wahid.foundation.indonesia.masih.rawan.intoleransi.dan.radikalisme>
- Sunarso, dkk. (2013). *Pendidikan Kewarganegaara*. Yogyakarta: UNY Press.
- Supardan, D. (2015). *Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Perspektif Filosofi dan Kurikulum*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Supardi. (2015). *Dasar-dasar Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Ombak.
- Ubaedillah, dkk. (2011). *Pendidikan Kewarganegaarn (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Uno, Hamzah B. dan Satria Koni. (2014). *Assesment Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winanrno. (2007). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Zamroni. (2007). *Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
- Zamroni. (2013). *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Ombak.